

**SAMBUTAN MENTERI KEHUTANAN
PADA PELUNCURAN BUKU INDEX
TATA KELOLA HUTAN DAN REDD+ INDONESIA
TAHUN 2012**

Jakarta, Senin, 6 Mei 2013

Assalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati:

Ketua UKP4/Ketua Satgas REDD+, Sdr. Dr. Kuntoro Mangkusubroto,
Country Director UNDP Indonesia, Ibu Beate Trankmann,
Bapak/Ibu/Hadirin yang saya muliakan.

Pertama-tama saya dan seluruh jajaran Kementerian Kehutanan menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada UNDP Indonesia yang telah memfasilitasi studi dan penerbitan laporan tentang "Index Tata kelola Hutan dan REDD+ Indonesia Tahun 2012", yang hari ini akan diluncurkan dan diinformasikan kepada publik.

Saudara sekalian yang saya hormati,

Kementerian Kehutanan pada waktu penyusunan kerangka konseptual penilaian Tata Kelola Partisipatif (*Participatory Government Assessment / PGA*), telah diikutsertakan dalam proses penggalian masalah yang terkait REDD+ dan kehutanan secara mendasar. Dari hasil identifikasi masalah tersebut diformulasikan dengan sejumlah tindakan kebijakan oleh masing-masing aktor yaitu pemerintah, pelaku usaha (bisnis), masyarakat madani (*Civil Society Organization / CSO*) dan masyarakat.

Melalui penilaian Tata Kelola Partisipatif/PGA ini, terdapat 6 (enam) isu pokok terkait perencanaan ruang dan hutan, hak atas sumberdaya hutan, pengorganisasian, pengelolaan hutan, penegakan hukum dan kesiapan infrastruktur REDD+ seperti kelembagaan dan MRV. Tentulah tidak mudah

melakukan PGA dengan 6 (enam) isu utama tersebut tanpa menelaah kebijakan dan peraturan perundangan, kapasitas pemangku kepentingan seperti pemerintah, CSO, pelaku usaha dan masyarakat.

Alhasil dari 10 provinsi dan 20 kabupaten yang dilakukan PGA, secara nasional Index Tata Kelola Hutan, Lahan dan REDD+ mendapatkan nilai 2,33 dari nilai skala 1-5. Dengan demikian masih diperlukan kerja keras untuk mencapai nilai tertinggi 5 (lima) baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Hadirin yang saya hormati,

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan periode 2010 - 2014, tata kelola hutan dan REDD+ merupakan bidang yang menjadi target pembangunan. Berbagai kegiatan untuk memperkuat tata kelola hutan dan REDD+ telah banyak dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah penguatan kelembagaan pengelolaan hutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia kehutanan, peningkatan kesempatan kepada masyarakat disekitar hutan untuk berpartisipasi aktif dalam pengusahaan hutan, peningkatan pengawasan internal dalam setiap pembangunan kehutanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, dan partisipatif.

Sebagai hasil kerja keras dari penerapan tata kelola yang baik, Kementerian Kehutanan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi dibandingkan dengan masa-masa lalu. Capaian Kementerian Kehutanan yang signifikan berkaitan dengan visinya yaitu "Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan" dijabarkan dalam program dan kegiatan antara lain:

1. Kebijakan Kementerian Kehutanan selaras dengan keinginan publik, yaitu mengurangi eksploitasi hutan, menerapkan moratorium penerbitan ijin baru pada kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dan meningkatkan akses legal dan pembiayaan bagi masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan.

2. Mempermudah dan memperlancar proses pelayanan publik di sektor kehutanan khususnya dalam pelayanan perijinan, pelayanan informasi, dan pelayanan pengaduan publik terhadap pelaksanaan tugas oleh aparatur Kementerian Kehutanan.
3. Pengelolaan keuangan negara lingkup Kementerian Kehutanan telah dilakukan dengan baik, yaitu dicerminkan dengan Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan tahun 2011 dengan kualifikasi Wajar Wajar Tanpa Pengecualian.
4. Di tingkat tapak, untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan hutan dan pelaksanaan REDD+, dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) agar semua program dan kegiatan 2014 dapat diimplementasikan.
5. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sektor Kehutanan, dilakukan dengan online system dan terus ditingkatkan, serta remunerasi yang tahun 2012 ini telah disetujui sebesar 50%.

Saudara sekalian yang kami muliakan,

Walaupun telah tercapai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan tersebut, belum berarti semua persoalan telah diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu kami secara terus menerus akan meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan hutan dan pelaksanaan REDD+ sesuai dengan harapan publik.

Sejalan dengan itu, laporan kondisi tata kelola hutan dan REDD+ ini akan menjadi salah satu masukan kepada Kementerian Kehutanan dalam menyusun rencana pembangunan kehutanan kedepan, khususnya pembangunan terkait dengan penguatan tata kelola yang baik dalam pengelolaan hutan dan pelaksanaan REDD+. Disamping itu, sistem penilaian tata kelola ini juga akan menjadi model untuk digunakan dalam melakukan penilaian tata kelola hutan dan REDD+ di masa yang akan datang.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada UNDP Indonesia, serta kepada para pihak yang telah bekerja keras sehingga laporan Index Tata Kelola Hutan dan REDD+ Indonesia Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik.

Wassalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MENTERI KEHUTANAN

ZULKIFLI HASAN